



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Surabaya , 18 Januari 1984

Nomor : 501/1116/022/1984  
Sifat : PENTING  
Lampiran : -  
Perihal : Pengamanan kesehatan dan keselamatan masyarakat dari kejadian luar biasa/bencana alam/rawan pangan

Kepada  
Yth. 1. Sdr. Pembantu Gubernur  
2. Sdr. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II  
di  
JAWA TIMUR

Diberitahukan dengan hormat bahwa setiap tahun (terutama pada masa pergantian musim kemarau dan penghujan), sebagai akibat perubahan iklim dan masa panen belum tiba, sering terjadi kerawanan tertentu, seperti ancaman bencana alam, musibah penyakit, keracunan dan menurunnya daya beli masyarakat.

Dalam pergantian musim kemarau ke musim penghujan tahun ini, telah terjadi beberapa kasus, antara lain :

1. Keracunan beberapa orang penduduk di Desa Tiudan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung
2. Muntaber di Desa Seduri, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
3. Langkanya pekerjaan yang mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan, di :
  - a. Desa Wates, Desa Alas Tlogo dan Desa Sewedasari (wilayah Kecamatan Lekok), serta Desa Sebalong dan Desa Nguling (wilayah Kecamatan Nguling), Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan.
  - b. Desa Alun-alun dan Desa Penawungan (wilayah Kecamatan Ranuyoso), Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.
  - c. Desa Sawahan dan Desa Sendang (wilayah Kecamatan Donorejo) , Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan .

- d. Desa Lengkong dan Desa Ngembung (wilayah Kecamatan Cerme), Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.
  - e. Desa Jonggol (wilayah Kecamatan Kauman), Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo.
  - f. Desa Wadung dan Desa Klumpit (wilayah Kecamatan Sooko), Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban.
  - g. Desa Trenggulunan dan Desa Sambong (wilayah Kecamatan Ngasem) Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.
  - h. Desa Mandu (wilayah Kecamatan Saradan), Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun.
  - i. Desa Karangwungu (wilayah Kecamatan Laren), Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
  - j. Desa Tlogosari (wilayah Kecamatan Wonosari), Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso.
  - k. Desa Tepos dan Desa Selobanteng (wilayah Kecamatan Besuki) , Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo.
  - l. Desa Sumber, Desa Gemito, dan Desa Tukul (wilayah Kecamatan Sumber), Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo.
  - m. Desa Kombang, Desa Palasa dan Desa Poteran (wilayah Kecamatan Talango), serta Desa Lapataman dan Desa Bungin-bungin (wilayah Kecamatan Dungkek), Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep.
  - n. Desa Larangan Tokol (wilayah Kecamatan Tlanakan) , Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan.
4. Meluasnya luapan banjir rutin tahunan dari Bengawan Solo di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro. Serta
  5. Kewaspadaan bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang terhadap ancaman longsornya endapan pasir (jutaan meter kubik) yang masih ada pada kantong atau waskom puncak Gunung Semeru yang telah diketahui bahwa tepian dindingnya nampak retak-retak, yang sewaktu-waktu perlu diwaspadai apabila terjadi hujan lebat.

Menghadapi berbagai kasus yang menyangkut keselamatan, kesehatan dan pengamanan masyarakat tersebut, perlu kami sampaikan petunjuk-petunjuk sebagai berikut :

#### I. PENCEGAHAN TERHADAP ANCAMAN KERACUNAN AKIBAT PESTISIDA ✓

1. Agar dilakukan pengawasan dan penyuluhan terus menerus terhadap toko dan kios yang menjual pestisida, agar penyimpanannya dितertibkan, tidak dicampur atau dekat dengan bahan pangan/makanan, dengan diikuti oleh monitoring secara berlanjut.

2. Masyarakat diminta agar berhati-hati dalam menyimpan dan menggunakan semua jenis bahan pestisida.
3. Untuk menjual pestisida, hendaknya disimpan dalam ruang tersendiri, tidak dijadikan satu dengan bahan makanan.
4. Penyuluhan kepada masyarakat perlu ditingkatkan mengenai bahayanya pestisida, agar masyarakat sadar mengenai perlunya menyimpan bahan pestisida dengan baik dan tidak tercampur bahan lain, terutama makanan (bahkan diminta agar diberi label atau tulisan).
5. Setiap terjadi peristiwa seperti di Tulungagung tersebut di atas hendaknya secepat mungkin dilaporkan/diberitahukan kepada Pimpinan PUSKESMAS setempat.
6. Perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan, penjualan dan penyebaran (distribusi) bahan pestisida.
7. Agar bersama-sama Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II, meningkatkan penyuluhan melalui PKMD, dengan menghimpun kader-kader yang lebih dahulu dibina dan dibekali, untuk menjadi penyuluh/pembina/pengamat terjaminnya kesehatan masyarakat dalam kelompok masing-masing.

## II. PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN MUNTABER

1. Penyuluhan mengenai Muntaber supaya ditingkatkan lagi, terutama kepada masyarakat yang sering dilanda muntaber.
2. Penjelasan mengenai upaya penanggulangan muntaber (sebelum memperoleh pertolongan Dokter), antara lain dengan memakai garam oralit.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar memelihara kebersihan, kesehatan dan kelestarian lingkungan dalam mencegah penyakit muntaber dan lain-lainnya.
4. Tim Penggerak PKK pada semua jajaran ikut aktif memberi penyuluhan kepada keluarga-keluarga melalui kegiatan rutin Taman Gizi.

## III. MENANGGULANGI MENURUNNYA DAYA BELI MASYARAKAT

1. Diminta agar maksud surat edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 501/16303/022/1983 tanggal 16 September 1983 mengenai langkah-langkah menghadapi musim kemarau dan paceklik tahun 1983/1984 lebih dikembangkan di Daerah-daerah.
2. Motivasi untuk memfungsikan kembali lumbung desa/lumbung kemakmuran/lumbung paceklik dan gerakan jimpitan hendaknya ditingkatkan, dengan mengikutsertakan semua pemuka masyarakat dan pemuka agama, agar kesadaran memakmurkan lumbung/jimpitan meningkat terus.

3. Melalui Tim Penggerak PKK dan kader-kader PKK diminta agar dilakukan penyuluhan kepada keluarga-keluarga, untuk membiasakan diri menyimpan sebagian bahan pangan (sebagai cadangan bagi masa-masa langka pekerjaan). Bila menyimpan dirumah sendiri masih dirasakan sulit (khawatir ikut termakan), penyimpanan bahan pangan tersebut hendaknya dilakukan kolektif di lumbung kemakmuran, yang dibangun secara gotong royong pada tiap RT/RW.
4. Persediaan air bersih untuk musim kemarau harus diatur sebaik-baiknya, dan kordinasi antar instansi ditingkatkan.
5. Selain dapat dimintakan bantuan kepada Gubernur Kepala Daerah, dengan disertai laporan dini dan penelitian setempat, juga diminta agar dalam APBD Tingkat II masing-masing disediakan dana penanggulangan paceklik.
6. Bila keadaan mendesak dan harus cepat bertindak, hendaknya Satuan Kordinasi Penanggulangan Bencana Alam Daerah Tingkat II setempat mengambil langkah-langkah pemberiap bantuan pangan secepatnya, dengan menggunakan persediaan bantuan pangan yang ada pada Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kotamadya setempat, namun segera disusul dengan laporan kilat kepada Gubernur Kepala Daerah.
7. Bagi Desa-desanya yang setiap tahun telah berulang kali tertimpa musibah semacam ini, hendaknya disiapkan proyek padat karya, sehingga membuka lapangan kerja.

#### IV. PENINGKATAN KEWASPADAAN SATKORLAK PBA DAERAH TINGKAT II

1. Baik untuk menghadapi banjir rutin Bengawan Solo maupun menghadapi endapan pasir di lereng Gunung Semeru, Satuan Kordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam Daerah Tingkat II setempat, hendaknya selalu dalam kesiapsiagaan tertinggi dan telah memiliki upaya penanggulangan pertama bila sewaktu-waktu terjadi bencana, sesuai dengan ketentuan SATKORLAK PBA yang berlaku.
2. Laporan dini setiap terjadi bencana alam hendaknya ditingkatkan.

Demikian petunjuk-petunjuk yang perlu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

 *Wahono*

WAHONO